



News Letter

BIRO UMUM DAN HUMAS
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

Edisi 08/NL/08/2015

Agustus 2015

**Presiden Instruksikan Mentan dan Menteri Terkait
Antisipasi Dampak Kekeringan**

Mentan Lantik 13 Pejabat Eselon II

**Mentan Minta Pejabat Eselon II Tingkatkan
Kinerja dan Serapan Anggaran**



Presiden Instruksikan Mentan dan Menteri Terkait Antisipasi Dampak Kekeringan	02
Mentan Lantik 13 Pejabat Eselon II	04
Mentan Minta Pejabat Eselon II Tingkatkan Kinerja dan Serapan Anggaran	06
Kementan Minta Optimalisasikan Irigasi dan Lahan Untuk Dorong Perekonomian Daerah	07
Untuk Antisipasi Kekeringan Kementan Siapkan Anggaran Khusus	09
Kementan Bangun Posko Kekeringan Dengan Instansi Terkait	10
Program GP-PTT Sebagai UPSUS Peningkatan Padi Nasional	11
Ditengah Kekeringan Kaltim Tetap Berproduksi, Pemerintah Naikan Anggaran Pertaniannya	13
Optimalkan Produktivitas Padi Kalsel Serta Produktivitas Padi Di Jawa	14
Kementan Gelar Rapat UPSUS Untuk Rumuskan Langkah Menjamin Stok Beras	15
Kementan dan GPMT Sepakat Bentuk Tim Khusus Pengendali Pasokan Jagung	17
Kementan Lindungi Petani Dengan Asuransi Pertanian	18
Pesan Mentan Untuk Seluruh Petani Di Indonesia	19
Kementan Buktikan Pasokan Sapi Tidak Langka	21

Pengarah
Kepala Biro Umum dan Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

Penanggung Jawab
Ir. Marihot H. Panggabean, M.Si

Penyunting
Agus Sumantri, S.Sos

Pelaksana
Dra. Ria Satiti Irawati
Imam Santoso, SE

Anggota
Alice Raga Dewi, S.Sos
Ir. Rusman
Fajar Rahman, M.S.Ikom
Kurniawatisari, S.Sos

Distribusi
Makmur

Narasumber
Pejabat Kehumasan unit Eselon I
Lingkup Kementerian Pertanian

Presiden Instruksikan Mentan dan Menteri Terkait Antisipasi Dampak Kekeringan

“Presiden meminta Mentan melakukan langkah-langkah penyelamatan. Di antaranya berkoordinasi dengan kepala daerah untuk memanfaatkan DAK, untuk membuat program antisipasi gagal panen. menginstruksikan Kementerian terkait untuk mengamankan panen tahun 2015. Mentan dan Menteri PU dan PR diperintahkan untuk menyediakan air untuk sawah dan ladang pertanian yang mengalami kekeringan panjang dampak terjadinya El Nino”



penyelamatan. Di antaranya berkoordinasi dengan kepala daerah untuk memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK), untuk membuat program antisipasi gagal panen. Pemerintah akan menyediakan dana sekitar Rp 6,6 triliun dari DAK yang bisa dipakai untuk pembangunan embung, dam-parit, dan sumur air tanah dangkal, khususnya di daerah endemis kekeringan dan sawah tadah hujan.

Presiden juga menegaskan, dalam situasi kekeringan, yang tak kalah penting adalah menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok. Maka, Presiden menghimbau Menteri Pertanian berkoordinasi dengan Bulog untuk memastikan bahan kebutuhan pokok, tak hanya beras, tersedia dengan harga terjangkau di pasar.

“Kalau perlu terus melakukan operasi pasar. Berdasarkan data Bulog diketahui cadangan beras per 2 Agustus 2015 sebesar 1,7 juta ton dan target sampai Desember 2015 minimal 2,5 juta ton. Perkiraan neraca beras tahun 2015 surplus 9,9-10,4 juta ton. Secara umum, produksi padi dan ketersediaan beras tahun ini cukup aman” tegas Presiden

Dalam rapat yang dihadiri Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertanian dan beberapa menteri lainnya, Presiden mengaku tetap optimis kekeringan tersebut tidak akan mempengaruhi ketahanan pangan nasional karena beberapa daerah telah melaporkan akan panen raya pada September mendatang. Hal itu berdasarkan laporan saat Presiden berkunjung ke Jawa Timur dan Sulawesi Selatan pekan lalu, dua daerah itu tidak mengalami kekeringan akibat El Nino.

Guna membahas dampak El Nino yang membuat beberapa wilayah di Indonesia banyak mengalami kekeringan, maka Presiden RI kembali mengumpulkan para menteri yang tergabung dalam kabinet kerja yang terkait dalam suatu rapat terbatas dengan topik antisipasi dampak El Nino terhadap ketahanan pangan. Presiden telah menginstruksikan untuk mengantisipasi dampak El Nino yang mengakibatkan kekeringan dan dikhawatirkan mengganggu produksi beras dan juga kebakaran hutan

“Dampak ini memang harus diantisipasi baik dari sisi pertanian, perikanan serta kehutanan dan yang penting juga terkait masalah ladang, yang kemungkinan kekeringan. Yang paling penting sawah ladang yang kemungkinan akan terjadi gagal panen karena kekeringan. Apalagi berdasarkan laporan ada sawah ladang yang mengalami kekeringan.” kata Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Terbatas di Kantor Presiden, (6/8).

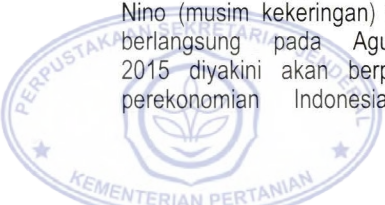
Presiden mengatakan fenomena El Nino (musim kekeringan) yang diprediksi berlangsung pada Agustus-Desember 2015 diyakini akan berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Pemerintah

memandang serius dampak El Nino dan menyiapkan antisipasi sedini mungkin. Karena dampak dan pengaruhnya di bidang pertanian, kehutanan, maupun perikanan sangat besar.

Pemerintah sudah menyiapkan dana cadangan Rp 3,5 triliun untuk stabilisasi pangan, tetapi Presiden belum mau menggunakan dana itu, dan lebih menginstruksikan Kementerian terkait untuk mengamankan panen tahun 2015. Untuk itu Menteri Pertanian dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diperintahkan mengerahkan seluruh upaya untuk menyediakan air untuk sawah dan ladang pertanian yang mengalami kekeringan panjang dampak terjadinya El Nino.

“Dampak dari El Nino akan dapat merugikan kalangan rakyat kecil. Mereka inilah yang harus kita selamatkan terlebih dahulu. Masalah yang paling vital pada saat musim kekeringan adalah adanya ketersediaan air yang melimpah. Karena itu penting untuk membangun sumur-sumur di lahan yang mengalami kekeringan, di samping memastikan waduk, embung, dan saluran irigasi berfungsi,” ujar Presiden.

Lebih lanjut Presiden meminta Menteri Pertanian melakukan langkah-langkah



“Dari kunjungan saya kemarin ke Jawa Timur, sudah dilaporkan oleh Gubernur Jawa Timur, dampak El Nino ini kecil sekali karena panen di bulan September nantinya cukup besar, begitu pula Gubernur Sulawesi Selatan juga melaporkan produksi beras di sana tidak ada masalah karena bulan September juga akan ada panen raya yang cukup besar. Sejauh ini baru dua daerah itu yang saya ketahui. Mungkin di daerah-daerah lain, Menteri Pertanian bisa menyampaikan daerah lain yang terimbas dampak El Nino” kata Presiden.

Selain meminta laporan dari Menteri Pertanian terhadap beberapa daerah yang memiliki dampak kekeringan akibat El Nino. Presiden juga meminta Mentan menjelaskan daerah mana saja yang terjadi kekeringan dan berdampak pada menurunnya produksi pangan.

Menanggapi permintaan Presiden, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menjelaskan bahwa Indonesia terdapat kawasan endemis kekeringan sekitar 200 ribu hektar. Tercatat pada tahun 2014, sekitar 159 ribu hektar mengalami kekeringan, banjir, dan hama. Sedangkan beberapa daerah yang mengalami kekeringan diantaranya Jawa Barat yakni Indramayu, Cirebon, Jawa Tengah seperti Demak, Pati, Grobogan, Jawa Timur daerah Bojonegoro dan Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Timur Tengah Selatan.

Menurut Mentan, pihaknya melakukan antisipasi kekeringan karena Indonesia

termasuk kategori endemis kekeringan. Sejauh ini Kementerian Pertanian telah mengantisipasi kekeringan dengan berbagai kegiatan. Di antaranya rehabilitasi 1,3 juta hektare jaringan irigasi tersier, bantuan pompa air 21,678 unit, membangun embung 1,000 unit, membangun dam parit/long storage, membangun sumur air sawah dangkal, menggerakkan brigade kekeringan, dan merevisi APBN 2015 Rp 500 miliar untuk menangani kekeringan.

“Hasil kegiatan yang dilakukan sejak November 2014 hingga Juli 2015, mampu menyelamatkan lahan seluas 114,701 hektare dari ancaman puso. Itu terjadi karena adanya penambahan luas tambah tanam pada periode Oktober 2014-Maret 2015 seluas 238,669 ha dan periode April-Juni 2015 seluas 63,978 ha. Setiap tahun terdapat lahan 200.000 hektare yang kekeringan. Tahun ini, karena adanya antisipasi lebih awal dengan membentuk tim khusus yang dinamakan Upsus (Upaya Khusus), maka kita berhasil menyelamatkan kurang lebih 100 ribu hektar” kata Mentan.

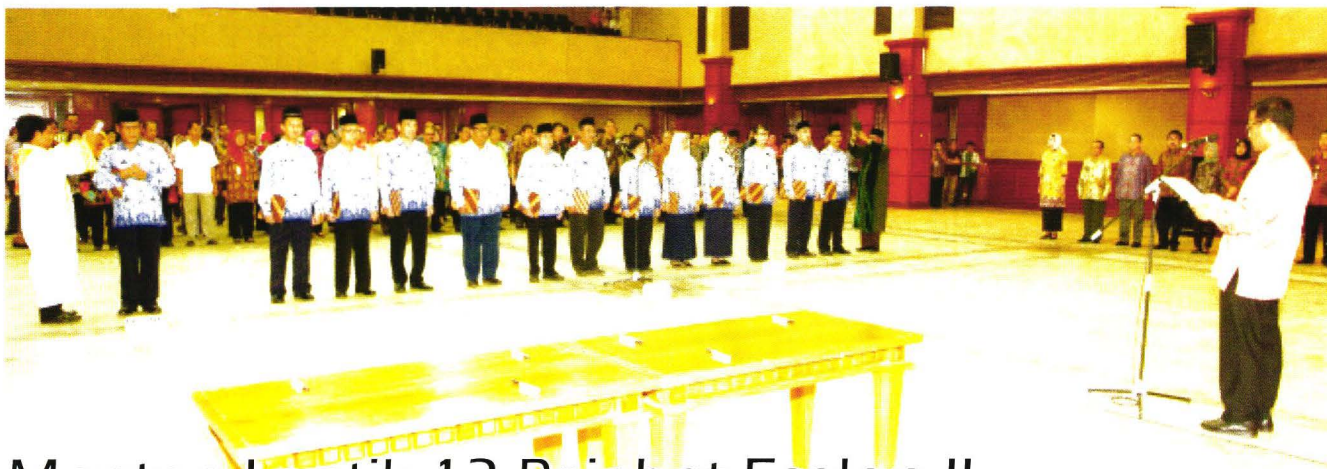
El Nino yang mengakibatkan kekeringan hingga saat sekarang masih dapat diatasi dan belum berdampak terhadap ketahanan pangan nasional. Dengan berbagai macam langkah antisipasi oleh Kementerian Pertanian dan instansi terkait lain menghadapi El Nino, Mentan masih optimis produksi beras tahun 2015 sesuai dengan target 75,5 juta ton dan stok beras saat ini sekitar 1,5 juta ton proyeksi produksi

padi dapat mencapai 75,5 juta ton, sesuai dengan angka ramalan (aram) Badan Pusat Statistik (BPS),

“Sekarang masih aman, stok kita 1,5 juta ton, stok pangan untuk beberapa bulan ke depan, masih aman, yaitu sebesar 1,5 juta ton. Stok tersebut dianggap aman sehingga tidak perlu impor, karena impor adalah pilihan paling terakhir, impor beras merupakan opsi terakhir untuk menjaga stabilisasi pangan tahun ini. Berdasarkan perkiraan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian, hingga akhir tahun ini ada sekitar 75,5 juta ton gabah kering giling (GKG)” ujar Mentan.

Mentan mengatakan bahwa El Nino tidak akan mempengaruhi perhitungan tersebut secara drastis, dimana paling hanya mempengaruhi 75,2 juta ton, sehingga tidak akan terlalu signifikan, dan Mentanpun menilai dana cadangan Rp 3,5 triliun belum perlu digunakan, mengingat cadangan beras masih aman.

“Itu dana cadangan saja. Produksi Insyaallah bisa gunakan angka ramalan BPS, dan saya yakin dengan stok beras nasional hingga akhir tahun, apalagi dampak El Nino belum sampai puncaknya yaitu pada bulan Agustus. Yang sedang kita antisipasi adalah kekeringan pada bulan September-Oktober, Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga sudah memaparkan di akhir Oktober sudah ada hujan” kata Mentan.



Mentan Lantik 13 Pejabat Eselon II

“Tantangan di sektor pertanian masih cukup berat, pejabat yang baru dilantik harus segera berkonsolidasi dengan jajaran instansi terkait dan menggerakkan sumberdaya di Unit Kerja yang dipimpinnya”

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 495 / Kpts / KP.230 / 8 / 2015 maka ditetapkanlah tiga belas orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen

Perkebunan serta Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penetapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut dilakukan secara berkesinambungan menunjukkan Kementerian Pertanian selalu dinamis dalam rangka peningkatan kinerja dan melaksanakan tugas-tugas besar percepatan pencapaian swasembada pangan.

“Untuk mencapai target swasembada pangan yang telah kita canangkan, kita membutuhkan pejabat yang pekerja keras, memiliki komitmen tinggi, mempunyai leadership yang tangguh di setiap unit kerja. Apalagi tantangan ke depan masih cukup berat, kekeringan di beberapa daerah, hambatan distribusi komoditi, dan situasi ekonomi dunia dan nasional yang



belum kondusif. Untuk itu perlu perjuangan dan kerja keras kita semua” kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat melantik Pejabat Eselon II di Kampus Kementan (7/8).

Mentan menuturkan selama lebih dari sepuluh bulan melaksanakan program UPSUS Swasembada Pangan dan peningkatan produksi komoditas strategis telah mengindikasikan keberhasilannya, ditunjukkan pasokan pangan cukup stabil dengan tidak mengimpor, begitu pula hambatan distribusi dan permainan perdagangan dapat diredam.

“Target produksi berdasarkan Angka Ramalan BPS akan dapat kita raih apabila dalam lima bulan ke depan kita mampu mengatasi tantangan yang ada. Untuk itu kepada pejabat yang baru dilantik, Saya berharap Saudara sekalian segera berkonsolidasi dengan jajaran instansi terkait dan menggerakkan sumberdaya di Unit Kerja yang Saudara pimpin” tutur Mentan.

Kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura, Mentan meminta agar segera berkoordinasi khususnya dengan para Direktur di lingkungan Ditjen Hortikultura untuk mengawal berbagai kegiatan



instansi terkait lainnya.

Untuk Direktur Perbenihan Tanaman Pangan, agar segera menghitung kembali kebutuhan benih bersubsidi tahun 2016, lakukan penyempurnaan sistem perbenihan dan distribusi benih dengan berkoordinasi dengan PT SHS dan PT Pertani serta lembaga terkait lainnya.

“Upayakan agar target ketersediaan

sekarang masih sangat lambat.

Mentan juga mengingatkan Direktur Pakan agar segera menetapkan langkah aksi peningkatan produksi dan mutu pakan ternak dengan memanfaatkan sumberdaya lokal, terutama jagung. Produksi jagung dalam negeri cukup, maka impor harus dapat dikendalikan. Kerjasama BULOG dan GPMT agar difasilitasi dalam upaya kemandirian pakan. Begitu pula Direktur Kesehatan Hewan, agar segera menetapkan langkah aksi untuk pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis. Program pengendalian penyakit rabies juga menjadi fokus yang harus diperhatikan.

Selain itu kepada Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, agar segera memperbaiki upaya penjaminan pangan asal hewan yang sehat, utuh, aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan. Keseimbangan pasokan dalam negeri dan impor harus tetap dijaga, sehingga usaha peternakan kondusif bagi kesejahteraan peternak.

Sedangkan kepada Ketiga Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan, Mentan juga menginstruksikan agar menetapkan langkah aksi peningkatan nilai tambah dan daya saing produk tanaman pangan, perkebunan dan peternakan yang mampu berkompetisi di pasar dan mampu meningkatkan pendapatan petani, pekebun dan peternak.

“Sinergikan upaya tersebut dengan program Toko Tani Indonesia untuk memasarkan produk olahan tanaman pangan, perkebunan dan peternakan. Peningkatan ekspor harus terus didorong, bantu hambatan teknis di Negara tujuan ekspor” ujar Mentan.



strategis, utamanya UPSUS Swasembada Cabai dan Bawang Merah. Diharapkan perencanaan yang sudah bagus dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Sedangkan kepada Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, agar segera menetapkan langkah aksi percepatan kegiatan dan serapan anggaran tahun 2015 dan mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasil sayuran dan tanaman obat, terutama cabe dan bawang merah.

Begitu juga kepada Direktur Serealia, Mentan menghimbau untuk segera menetapkan langkah aksi untuk peningkatan produksi padi dan jagung. Pastikan upaya tersebut mampu mewujudkan capaian produksi sesuai ARAM I BPS bahkan lebih tinggi. Tingkatkan koordinasi dan sinergi dengan Ditjen PSP, Badan Litbang Pertanian, BPPSDMP dan lembaga/

benih secara 6 tepat mampu mendukung UPSUS Swasembada Pangan. Saya berharap Saudara melakukan pemberdayaan kepada penangkar benih lokal” himbau Mentan.

Lebih lanjut Mentan memerintahkan kepada Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, agar segera berkonsolidasi internal untuk langkah aksi peningkatan menetapkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan dan penyegar, terutama kakao, kopi dan komoditi ekspor lainnya. Sedangkan untuk Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, agar segera menetapkan program perbaikan perbibitan dan peningkatan produksi daging utamanya daging sapi dan kerbau. Upayakan juga secara maksimal peningkatan populasi ternak. Program inseminasi buatan dan gertak birahi supaya berjalan sukses karena saat



Mentan Minta Pejabat Eselon II Tingkatkan Kinerja dan Serapan Anggaran



"Pelantikan pejabat baru sebagai bentuk penyegaran di lingkup Kementan yang diharapkan akan mendorong penyerapan anggaran dan kinerja Kementan pada semester II sehingga bisa lebih baik lagi. Untuk itu Pejabat yang baru harus bekerja keras dalam mengejar penyerapan anggaran 2015 sesuai target yang harus dicapai"

Pada tahun anggaran 2015, Kementan telah memperoleh anggaran pertanian sebesar Rp 32,8 triliun yang mana porsi terbesar diperuntukkan kepada infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi serta modernisasi alat dan mesin pertanian. Tetapi penyerapan anggaran pembangunan di Kementerian Pertanian untuk tahun 2015 hingga Agustus 2015 baru mencapai di atas 30 persen. Dengan kondisi demikian mendasari Menteri Pertanian merasa perlu melakukan pelantikan Pejabat Eselon II yang baru di lingkup Kementerannya.

"Pelantikan pejabat baru ini sekaligus penyegaran di Kementan karena 13 pejabat sebelumnya diganti karena dinilai tidak memenuhi target yang ditetapkan Kementan. Apalagi melihat realisasi penyerapan anggaran di Kementan hingga awal bulan ini baru sekitar 33% dari target 60%. Diharapkan, penyegaran di tubuh Kementan akan mendorong penyerapan anggaran dan kinerja Kementan pada semester II bisa lebih baik lagi" kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat usai melantik Pejabat Eselon II di Kampus Kementan (7/8).

Mentan mengungkapkan serapan anggaran tertinggi di lingkungan Kementan diraih oleh Ditjen Tanaman Pangan, yakni sebesar 71%. Sedangkan 3 Ditjen yakni Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen Perkebunan, dan Ditjen Hortikultura dinilai memiliki serapan anggaran kurang memuaskan.

"Untuk itu Pejabat yang baru saja dilantik akan bekerja keras dalam mengejar penyerapan anggaran 2015 sesuai target yang harus dicapai hingga 4 bulan lagi, dimana per minggu diharapkan dapat 32-35%.

Harus kita kejar sebanyak-banyaknya. Tapi kalau serapannya masih rendah, dan kinerjanya kurang bagus ya akan diganti lagi," ungkap Mentan.

Mengingat sebentar lagi musim tanam, Mentan telah meminta kepada Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan untuk segera menetapkan langkah aksi peningkatan produksi padi dan jagung serta memastikan upaya tersebut mampu mewujudkan capaian produksi sesuai ARAM I BPS bahkan lebih tinggi sedangkan Direktur Perbenihan Tanaman Pangan untuk segera menghitung kembali kebutuhan benih bersubsidi tahun 2016 serta melakukan penyempurnaan sistem perbenihan dan distribusi benih melalui koordinasi dengan PT SHS dan PT Pertani serta lembaga terkait lainnya.

"Di tengah bencana kekeringan sekarang ini. Apalagi, bulan Oktober mendatang musim tanam akan dimulai. Untuk itu, saya menginstruksikan semua pejabat di lingkungan Kementan untuk turun ke lapangan alias turun ke desa, setidaknya untuk 2 bulan ke depan. Saya minta semua turun ke lapangan sesuai dengan daerah masing-masing. Jadi, sekali lagi ingat serapan sebelum sarapan. Mari bergerak. Turun ke lapangan dan berikan laporan. Kalau perlu bangun posko, tinggal di lapangan 2 bulan" ujar Mentan.

Lebih lanjut Mentan menegaskan bahwa pada tahun 2015 lahan pertanian yang terkena kekeringan, serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) maupun banjir diperkirakan mencapai 100 ribu



hektar, sehingga seluruh jajarannya hingga dinas pertanian telah diinstruksikan untuk menyelamatkan tanaman padi yang sudah tertanam saat sekarang atau standing crop dari ancaman kekeringan. Semua tanaman padi yang sudah ada baik di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur harus diselamatkan.

"Walaupun kekeringan yang terjadi selama dua bulan terakhir masih dalam kategori normal, kita tetap meminta agar semua jajaran Kementerian Pertanian untuk segera turun ke lapangan dan harus menyelamatkan standing crop, hanya saja, waktunya maju dari biasanya yaitu September ataupun Oktober saat ini baru Agustus sudah mengalami kekeringan di sejumlah wilayah tanah air" tegas Mentan.



Kementan Minta Optimalisasikan Irigasi dan Lahan Untuk Dorong Perekonomian Daerah

"Kementerian Pertanian telah menargetkan lahan baru pertanian dalam rangka mengoptimalkan irigasi di Kabupaten Aceh Barat. Dengan pengoptimalan irigasi dan lahan pertanian, maka akan mendorong perekonomian daerah setempat sekaligus upaya swasembada pangan sehingga tercapai kedaulatan pangan"



irigasi Lok Guci dapat tuntas dalam 2 tahun.

"Pembangunan irigasi ini sebagai bentuk tindak lanjut dari instruksi bapak Presiden Jokowi, yang berjanji membantu 100 Miliar untuk penyelesaian pembangunan saluran irigasi yang terbengkalai ini, Kita meninjaunya, agar pembangunan irigasi ini bisa segera mungkin terfungsikan, karena sudah 12 tahun lebih belum juga siap irigasi yang potensinya sangat jelas bisa mengairi sawah seluas 20 ribu hektar, irigasi tidak bisa difungsikan karena saluran sekunder dan primer belum siap hal ini harus segera dituntaskan dengan adanya tambahan anggaran sebesar Rp 600 Miliar," kata Mentan.

Kementerian Pertanian telah menargetkan lahan baru pertanian dalam rangka mengoptimalkan irigasi di Kabupaten Aceh Barat. Dengan pengoptimalan irigasi dan lahan pertanian, maka akan mendorong perekonomian daerah setempat sekaligus upaya swasembada pangan. Mentan mengatakan anggaran telah disiapkan Pemerintah untuk menyiapkan lahan pertanian dalam rangka mengoptimalkan irigasi tersebut. Pemerintah pusat juga akan menyiapkan seluruh anggaran yang dibutuhkan.

Dalam mewujudkan kedaulatan pangan, Pemerintah RI melalui Kementerian Pertanian terus melakukan pengembangan produk pangan dari sektor pertanian. Untuk itu Menteri Pertanian begitu menekankan lima faktor yang mempengaruhi perkembangan pertanian Indonesia sehingga berdampak pada hasil produksinya. Lima faktor yang menjadi kunci persoalan pertanian adalah irigasi, alat mesin pertanian, pupuk, benih dan penyuluh.

"Kami melihat persoalan apa yang menjadi faktor kunci pertanian. Salah satunya irigasi yang mengalami rusak 52 persen di seluruh Indonesia. Perbaikan irigasi ditargetkan selesai 3 tahun, satu tahun 1 juta, Alhamdulillah dengan kerja keras kita semua, irigasi tersier sampai hari ini 1,37

juta hektare sampai dengan fisik. Doakan tahun ini selesai sampai 2 juta hektare," kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh (4/8).

Dalam kunjungannya tersebut, Mentan memerlukan meninjau irigasi Lhok Guci di Pante Ceremeun, Aceh Barat, yang telah terbengkalai. Pembangunan irigasi Lok Guci masuk dalam prioritas pembangunan sarana pertanian pada tahun 2015, bendungan irigasi Lhok Guci dengan daya tampung 18.542 meter kubik belum dimanfaatkan secara optimal, padahal potensi pertanian di wilayah tersebut sangat besar. Irigasi Lhok Guci bisa mengairi 20.000 hektare sawah. Belum dimanfaatkan karena irigasi primer dan sekunder belum selesai diperbaiki. Untuk itu Mentan menargetkan pembangun

"Dengan adanya irigasi teknis, diharapkan panen dapat dilakukan dua kali setahun. Bisa dibayangkan bagaimana peningkatan pendapatan petani, peningkatan ekonomi kabupaten Aceh Barat kalau ini rampung. Anggarannya tadi yang disiapkan kurang lebih Rp 600 miliar. Jadi mungkin selesai dalam dua tahunan paling cepat, tiga tahun paling lambat. Selain itu pembangunan sawah baru yang juga dilakukan di ujung Indonesia lain yaitu Papua 10 ribu hektar dan Aceh 10 hektar pada tahun 2016" kata Mentan.



Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Mentan meminta untuk kembali memanfaatkan lahan pertanian yang masih terbengkalai. Lahan pertanian aktif di wilayah tersebut saat sekarang hanya sekitar 6.000 hektare (ha) ditambah 1.000 ha yang baru. Padahal lahan di wilayah Aceh Barat yang bisa dijadikan bercocok tanam mencapai 20 ribu ha. Pada tahun 2016 pemerintah kabupaten Aceh Barat bisa menambah sekitar 10 ribu ha. Penambahan lahan tersebut akan menggunakan anggaran berasal dari pemerintah pusat sebesar Rp 600 miliar yang juga digunakan untuk percepatan pembangunan irigasi di wilayah tersebut.

"Saat ini ada lahan sawah seluas 7.000 ha, tahun depan Kementan berencana memulai program membangun sawah dan anggarannya ada dari pemerintah pusat. Kami targetkan 10.000 hektare yang merupakan areal baru. Areal pertanian tersebut merupakan areal yang dapat dijangkau irigasi. Semua daerah yang wilayah yang bisa dijangkau irigasi Lhok Guci. Kalau dapat terjangkau di atas 10.000 hektare maka kita akan tambah arealnya. Kami mulai bekerja awal tahun



"Yang ditargetkan totalnya 20.000 ha, sedangkan areal barunya targetnya kurang lebih 10.000 ha lebih. Tapi minimal 10.000 ha dapat kita selesaikan. Lahan yang sudah ada 7.000-an hektare berarti masih kurang 13.000 ha untuk mencapai 20.000 ribu hektare, saya berharap areal pertanian untuk persawahan 10.000 ha tersebut tidak dialihfungsikan masyarakat. Baru saja saya telah menghubungi Menteri PU, agar juga menyelesaikan irigasi primer dan sekunder" terang Mentan.

Mentan.

Selain irigasi faktor penting lainnya adalah alat mesin pertanian, menurut Mentan, bangsa Indonesia masih jauh dari ketercukupan alat mesin tersebut. Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Myanmar, Indonesia hanya memiliki sepersepuluh alat mesin pertanian dari negara Myanmar. Padahal, Indonesia merupakan negara yang besar dengan banyaknya penduduk yang menjadi petani sehingga kondisi yang saat ini terjadi dengan kekurangan alat mesin pertanian menyebabkan kurang optimalnya hasil produksi pertanian.

"Kementan terus mengupayakan untuk dapat mendistribusikan lebih banyak alat mesin pertanian sehingga nantinya dapat mendorong petani mengolah lahan pertanian dengan lebih optimal yang pada akhirnya akan memberikan hasil yang lebih baik. Hingga saat ini, Kementan telah menyalurkan 40.000 unit alat mesin pertanian. Angka tersebut meningkat tajam dari jumlah sekitar 3000-4000 alat mesin pertanian yang didistribusikan tahun lalu. Ini adalah penyaluran 40.000 unit alat mesin pertanian terbesar sepanjang sejarah," ujar Mentan.

Diakhir paparannya Mentan menerangkan faktor penting lainnya dalam mendukung produksi adalah pupuk. Masih banyaknya pupuk yang dicampur dengan bahan lain sehingga petani tertipu dan menggunakan pupuk yang tidak sesuai dengan komposisinya. Selanjutnya, faktor benih, yakni benih yang unggul sehingga hasil yang diperoleh pun akan lebih baik selain didukung dengan pupuk maupun irigasi. Faktor penting lainnya adalah Penyuluh pertanian yang juga memiliki peranan penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga dapat memaksimalkan cara pengolahan lahan dan tanaman yang kemudian memberikan hasil yang jauh lebih optimal.



dan tergantung nanti para petani dan masyarakat setempat supaya ikut membantu, mempermudah lokasi operasional lapangan," ujar Mentan.

Lebih lanjut Mentan menerangkan bahwa saat sekarang, terdapat sekitar 7.000 hektare areal persawahan di sekitar bendungan Lhok Guci, sedangkan penambahan 10.000 hektare merupakan target minimal areal baru dari target 20.000 hektare. Dalam pelaksanaan rencana pengoptimalan irigasi dengan penambahan areal persawahan hingga 10.000 hektare, pihak Kementerian Pertanian perlu berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Terkait irigasi tersier, Mentan mengatakan mulai Desember tahun 2014 sampai sekarang, pemerintah telah membangun irigasi tersier 1,3 juta hektar. Kinerja Kementerian Pertanian dengan pembangunan irigasi ternyata telah memberikan hasil yang baik di mana menekan daerah yang gagal panen akibat kekeringan dari 35.000 hektare menjadi 17.000 hektar.

"Sampai Agustus 2015 lahan yang puso hanya 17.000 hektar. Dibandingkan tahun lalu itu 35.000 hektar. Selain itu, daerah kekeringan berkurang dari 250.000 hektare pada tahun lalu menjadi 111.000 hektare pada 2015. Ada penurunan kekeringan karena gerakan kita membangun irigasi tersier kurang lebih 1,3 juta ha tahun ini. Itu menunjukkan hasil yang signifikan," kata



Untuk Antisipasi Kekeringan Kementan Siapkan Anggaran Khusus



"Kementan sudah mengantisipasi kekeringan yang telah dimulai sejak Desember 2014, dengan melakukan beberapa langkah antara lain pembagian pompa air kepada petani, pembangunan embung dan perbaikan irigasi tersier. Kementan telah menyiapkan anggaran khusus untuk mengantisipasi kekeringan di sektor pertanian."

Guna membahas penanggulangan kekeringan, Kementerian Pertanian menggelar Rapat Koordinasi (rakor) dengan anggota DPR Komisi IV, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan pihak Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. Rakor berlangsung pada tanggal 3 Agustus 2015 di Auditorium Gedung F Kampus Kementerian Pertanian.

Dalam Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi seluruh Indonesia, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan hingga sampai saat sekarang sekitar 17.000 hektar lahan sawah puso atau gagal panen dari total lahan sawah di Indonesia mencapai 9,2 juta hektar. Lahan pertanian yang mengalami gagal panen tersebut, tersebar antara lain di Jabar, Jateng, dan Lampung.

"Kami terus melakukan penanganan kekeringan di daerah yang menjadi langganan kekeringan yang tersebar di Jabar, Jateng, dan Lampung. Tahun ini antisipasi kekeringan yang kita lakukan antara lain membuat sumur dangkal, pompa, sumur dalam, dam-parit, ini upaya menyelamatkan tanaman padi yang ada. Tanaman padi jumlahnya 14 juta Ha, sampai Agustus yang sudah panen sebanyak 12,5 juta Ha dan sebanyak 1,5 juta Ha sisanya yang terdapat di musim kering ini" papar Mentan.

Mentan mengungkapkan Kementerian Pertanian sudah mengantisipasi kekeringan yang telah dimulai sejak Desember 2014 hingga sekarang, dengan melakukan beberapa langkah nyata antara lain pembagian pompa air sebanyak 21.000 unit kepada petani, pembangunan 1.000 embung dan perbaikan 1,3 juta hektar irigasi tersier.

"Lahan yang puso bisa ditutupi dengan 'tabungan' penambahan areal tanam

padi pada periode Oktober-Maret yang mencapai sekitar 400.000 hektar. Kami berupaya terus menyelamatkan tanaman padi di lahan siap panen yang ada. Kami siapkan skenario el-nino lemah, moderat atau kuat," ungkap Mentan.

Mentan memaparkan upaya khusus yang dilakukan oleh Kementan dalam menghadapi kekeringan yang dirata-rata tiap tahun terdapat daerah endemis sebanyak 200 ribu Ha tersebut terbukti optimal dilaksanakan. Jika dibandingkan dengan tahun lalu Kementan telah berhasil menandai gagal panen atau puso sekitar 50%-nya dari tahun lalu. Pada tahun 2014 ada 35 ribu Ha sedangkan tahun 2015 hanya ada 17 ribu Ha, terdapat di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung.

Lebih lanjut Mentan menjelaskan bahwa Kementerian Pertanian menyiapkan anggaran sebesar Rp 880 miliar khusus untuk mengantisipasi kekeringan di sektor pertanian. Awalnya pihak Kementerian Pertanian juga telah menyiapkan dana untuk perbaikan irigasi tersier sebesar Rp 2 triliun.

"Baru kemarin Komisi IV DPR menyetujui perubahan jumlah alokasi anggaran Kementerian Pertanian untuk penanggulangan kekeringan sebesar Rp 880 Miliar disamping dana sebesar Rp 2 triliun untuk perbaikan irigasi tersier" jelas Mentan.

Melengkapi pernyataan Mentan, Ketua Komisi IV DPR, Edhy Prabowo mengatakan DPR mendukung upaya Kementerian Pertanian dalam menangani kekeringan, antara lain mengizinkan perubahan pos anggaran dari beberapa pos dialihkan untuk dana kekeringan Rp 880 miliar, untuk wilayah yang dilanda kekeringan. DPR juga mengapresiasi Mentan karena selalu turun ke lapangan cegah selangkah lebih cepat. Hal ini

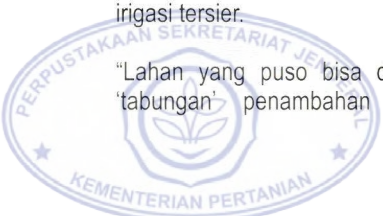
sudah sejalan dengan harapan dari Komisi IV DPR.

"Kami apresiasi keinginan Kementan, oleh karena itu saat Komisi IV DPR diminta Mentan untuk alihkan anggaran di Kementerian Pertanian untuk back up El Nino sebesar Rp 880 miliar, maka tidak perlu panjang lebar, langsung disetujui. Kami terus pastikan agar titik-titik tersebut sudah terairi. Kita bicara data, antisipasi apa yang tepat. Dana tersebut diambil melalui anggaran beberapa Ditjen, alokasinya merupakan hak prerogatif kementerian," kata Ketua Komisi IV.

Ketua Komisi IV DPR juga mengingatkan, pemerintah harus fokus pada penanggulangan kekeringan dan menegaskan kepada pemerintah agar fenomena suhu panas ekstrem yang menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia tidak dijadikan alasan untuk melakukan impor beras. Isu El-Nino jangan sampai dipakai kelompok tertentu untuk menghalalkan impor beras.

Sementara itu, Kepala BMKG Andi Eka Saka memaparkan fenomena alam kekeringan atau El Nino yang melanda Tanah Air Indonesia akan dirasakan dampaknya terutama di beberapa wilayah yang berada di selatan garis Khatulistiwa. Wilayah-wilayah tersebut antara lain Lampung Timur, Jawa, dan Bali hingga timur Indonesia. Dampak El-Nino terhadap ketersediaan air tanah, curah hujan dan kondisi cuaca selama beberapa bulan ke depan. Menurut BMKG, El Nino diprediksi akan berlangsung paling tidak hingga akhir Oktober dengan kecenderungan akan menguat.

"Kondisi akan kurang air, curah hujan sangat berkurang sekali. Curah hujan sangat sedikit di bawah 100 mm akan terjadi di daerah tersebut Agustus-Oktober, untuk itu Kami koordinasi terus dengan



Kementan karena iklim sangat terkait dengan sektor pertanian. Kami lihat Kementan sudahantisipasi sejak jauh hari

dengan pembagian bantuan pompa, membangun embung dan perbaikan irigasi. Oktober diprediksi hujan mulai ada, tapi belum bisa kondusif. Peluang hujan di bawah 100 mm/tahun bahkan lebih kering dari musim kemarau akan melanda Jatim, NTT, dan Sultra mulai Agustus hingga November," papar Ketua BMKG.

Ketua BMKG menyatakan, tingkat El Nino di Indonesia tahun ini mulai meningkat dari moderat ke kondisi kuat, bahkan diperkirakan mendekati kondisi kemarau parah yang melanda Indonesia di 1997. Meskipun dampaknya terhadap sektor pertanian mulai dirasakan, namun pemerintah sudah melakukan langkah antisipasi yang lebih baik dari yang dilakukan pada 1997 yakni dengan membangun embung, pompa, dan irigasi.

"Kondisi akan berkembang mendekati El Nino 1997, tahun ini El Nino sampai Oktober akhir. Perkiraan menguat mulai Agustus. Kami sampaikan presentasi dampak el nino potensi turunnya hujan mulai Oktober mendatang., Meski kondisi El Nino sama seperti 1997, antisipasinya lebih baik. Langkah-langkahnya lebih sigap. Dampaknya bisa diminimalkan, pemerintah" kata Ketua BMKG.



Kementan Bangun Posko Kekeringan Dengan Instansi Terkait

"Atasi kekeringan, Pemerintah membangun Pos Komando (Posko) Kekeringan Bencana Nasional, hasil kerja sama sejumlah kementerian di bawah koordinasi Kementerian Pertanian"

Kementerian Pertanian membuka posko terpadu lintas lembaga untuk menanggulangi kekeringan nasional yang diprediksi terjadi hingga akhir 2015. Pembukaan posko terpadu melibatkan Kepolisian RI; Tentara Nasional Indonesia; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG); Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); Badan Urusan Logistik (Bulog); Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT); Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Perdagangan; serta Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.

"Diperkirakan ratusan ribu hektare sawah terancam gagal panen akibat kekeringan, untuk itu Pemerintah pusat akan

mengatasi masalah kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Tanah Air. Salah satunya membangun Pos Komando (Posko) Kekeringan Bencana Nasional, hasil kerja sama sejumlah kementerian di bawah koordinasi Kementerian Pertanian. Rapat koordinasi pembentukan posko terpadu sedang diadakan," kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman di sela acara pembukaan Posko Penanggulangan Kekeringan di kampus Kementan (10/8).

Kepada masyarakat, Mentan meminta agar kondisi kekeringan saat sekarang jangan diasumsikan sebagai bencana nasional, namun sebagai memasuki musim kemarau dan jangan mengasumsikan kekeringan tersebut semuanya berimbas pada semua persawahan, karena sebagian sudah panen dan tidak terkena dampak kekeringan. Tidak semua lahan pertanian, terutama tanaman padi mengalami

kekeringan. Ada 76,3 persen dari 14 juta hektar tanaman padi yang sudah bisa dipanen sebelum terdampak kekeringan. Namun ada sekitar 15 persen lahan pertanian yang harus benar-benar diperhatikan. Lahan pertanian ini belum masuk masa panen pada periode September hingga Oktober atau saat kemarau masih melanda.

"Menurut BMKG hujan akan terjadi di akhir Oktober, sehingga pada November diperkirakan sudah mulai hujan. Dengan begitu, dari 14 ribu hektar sawah, kemungkinan hanya 15 persen yang terkena dampak. 15 Persen ini yang menjadi perhatian kita. Oleh karena itu, kita harus segera mengantisipasi dua bulan tersebut. Dari 14 juta itu saat ini sudah panen 76,3 persen, berarti kan tidak bisa kena kekeringan lagi kan. Karena akhir Oktober kabarnya sudah turun hujan maka yang

menjadi perhatian serius adalah panen pada bulan September dan Oktober," pinta Mentan.

Mentan mengatakan, kekeringan yang tengah melanda sebagian besar kota di Indonesia sebagai dampak dari badai El Nino. Dampak kekeringan tersebut diperkirakan mempengaruhi 14 juta hektare (ha) sawah di Indonesia. Untuk setiap musim kemarau ada 200.000 hektare lahan pertanian di Indonesia yang kekeringan. Sejak Januari 2015 Kementan sudah mengantisipasinya dengan menyiapkan 21.000 unit pompa air dan memperbaiki irigasi tersier 1,3 juta hektare yang sudah didistribusikan ke seluruh Indonesia.

"Kementan dari awal sudah memiliki langkah antisipatif dalam mengatasi kekeringan, bergerak secara nyata sejak Januari 2015 perbaikan irigasi dan pendistribusian pompa air gencar dilakukan diseluruh wilayah nusantara untuk menggapai swasembada pangan. Kementan sudah siapkan pompa, sampai saat ini 21 ribu unit dan Kementan juga telah memperbaiki sejumlah saluran irigasi tersier sebanyak 1,3 juta Ha. Selain itu, jumlah pompa air ditambah, terutama di daerah yang dinilai potensial sebagai produsen tanaman pangan, seperti padi, jagung, dan kedelai" kata Mentan.

Menurut Mentan pada bulan Oktober nanti akan mengalami puncak kekeringan bagi 11 juta hektare lahan g siap panen, guna mengantisipasinya, Kementerian Pertanian

berencana membuat hujan buatan. Langkah tersebut telah dikordinasikan dengan sejumlah pihak terkait. Dalam waktu dekat pihak Kementan akan bekerja sama dengan TNI dan BNPB untuk melakukan hujan buatan. Walaupun menurut BMKG, November sudah turun hujan tetapi yang sudah dilakukan Kementan dengan upaya lebih awal karena ada tambah tanam 400.000 hektare.

"Kami sudah melakukan rapat bersama Kapolri, Menteri PU, kepala BNPP, Mendag menyepakati dalam waktu dekat akan membuat hujan buatan. Kami akan lakukan hujan buatan dan semoga dalam satu dua hari ke depan sudah bisa disiapkan dan ditindaklanjuti. Hujan buatan akan dipersiapkan dalam satu hingga dua hari hari. Hujan buatan ini dilakukan di daerah endemis kekeringan, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Lampung dan NTB. Daerah-daerah tersebut akan menjadi sasaran utama kita," ujar Mentan.

Terkait rencana hujan buatan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Syamsul Ma'arif menjelaskan bahwa pihaknya merencanakan hujan buatan untuk daerah endemis seperti, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel dan Lampung yang merupakan daerah dengan skala prioritas. Hujan buatan yang akan dibentuk bekerjasama dengan TNI mengerahkan 2 pesawat Hercules, Casa 295 dan Casa 212.

Sedangkan Kepala Badan Meteorologi

Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Andi Eka Sakyia, menjelaskan, kekeringan yang terjadi di Indonesia saat sekarang disebabkan oleh fenomena El Nino atau anomali suhu permukaan laut samudera Pasifik. Diperkirakan, cadangan air tanah di Indonesia masih bisa digunakan untuk mandi dan minum masyarakat hingga November 2015. El Nino akan terjadi pada Agustus hingga Desember.

"Dampaknya, musim hujan akan datang terlambat. Hal itu membuat musim kemarau akan lebih panjang dibanding biasanya. Daerah-daerah di Indonesia yang berpotensi terkena dampak El Nino 2015 meliputi Sumatera Selatan, Lampung, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan, NTT dan NTB bahkan sudah masuk kemarau sejak Maret lalu dan baru akan masuk musim hujan pada November 2015" jelas Kepala BMKG.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan, Rahmat Gobel juga menjelaskan akan melakukan pengontrolan supply dan demand terhadap kebutuhan pokok untuk masyarakat setiap waktu.

Sesuai tugasnya maka, Kapolri, Badrodin Haiti, mengungkapkan bahwa Kepolisian akan lakukan penelitian dan penindakan dari penyimpangan prosedur distribusi kebutuhan bahan pokok. Kepada penimbun yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga bahan pokok, Kapolri akan menindak tegas sesuai undang-undang.



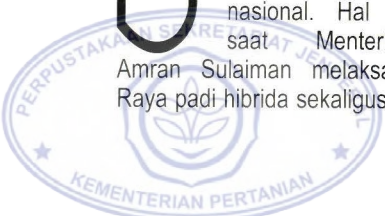
Program GP-PTT Sebagai UPSUS Peningkatan Padi Nasional

"Program GP-PTT merupakan Program padi hibrida sebagai salah satu upaya khusus peningkatan padi nasional untuk mencapai swasembada pangan yang ditargetkan tahun 2017. Dalam program GP-PTT, Kementerian Pertanian menggandeng TNI sebagai ujung tombak gerakan pendekatan kepada kelompok tani untuk melaksanakan teknologi pengelolaan tanaman terpadu".

Juluk Kapuas sebagai lumbung padi tidak hanya bergema di Provinsi Kalteng, namun juga sampai ke tingkat nasional. Hal itu dibuktikan saat Menteri Pertanian, Amran Sulaiman melaksanakan Panen Raya padi hibrida sekaligus dalam rangka

mensukseskan program Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-TT) di Kalimantan Tengah. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi, jenis padi unggul hibrida tersebut hasil panennya bisa mencapai 8 ton per hektare.

Program GP-PTT merupakan Program padi hibrida sebagai salah satu upaya khusus peningkatan padi nasional untuk mencapai swasembada pangan yang ditargetkan tahun 2017. Lahan yang digunakan program GP-TT tersebut berlokasi di Ds.



Terusan Makmur, seluas 600 hektare, Ds. Terusan Mulya 600 hektare dan Ds. Terusan Karya 600 hektare, dimana Mentan didampingi Panglima TNI bersama KSAD TNI dan Komisi IV DPR RI Hamdani melaksanakan Panen Raya padi secara simbolis

"Panen Raya padi ini merupakan suksesi dari program pemerintah dalam meningkatkan produksi padi melalui program gerakan penerapan pengelolaan tanaman terpadu atau GT-PTT di wilayah Kalimantan Tengah dengan alokasi lahan sawah pertanian seluas 2000 hektar. Pelaksanaan panen raya padi di wilayah Kuala Kapuas ini atas kerja keras yang dilakukan oleh TNI sesuai dengan MoU yang telah dilakukan bersama Kementan" kata Mentan.

Menurut Mentan dalam program GT-PTT, Kementerian Pertanian menggandeng TNI sebagai ujung tombak gerakan pendekatan kepada kelompok tani untuk melaksanakan teknologi pengelolaan tanaman terpadu.

"TNI sebagai ujung tombak gerakan pendekatan kepada kelompok tani untuk melaksanakan teknologi pengelolaan tanaman terpadu yang salah satunya dengan menurunkan Babinsa ke pelosok Desa di Kalimantan Tengah khususnya di Kapuas" ujar Mentan.

Mentan mengungkapkan dengan adanya Panen Raya padi yang dilaksanakan di Kuala Kapuas provinsi Kalimantan Tengah maka pemerintah Kabupaten Kapuas berhasil meningkatkan angka produksi padi dari sebelumnya hanya mampu memproduksi padi sebanyak 3,2 ton per hektar, namun saat sekarang sudah meningkat secara signifikan menjadi 8,7 ton per hektar. Mentan pun berpesan kepada para petani setempat agar menjual gabahnya kepada Badan Urusan Logistik dan kepada pihak Badan Urusan Logistik harus dapat mengontrol hasil produksi pertanian tersebut

"Ini bukti keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam meningkatkan produksi padi, dengan memperbaiki varietas. Sehingga produksi padi tadinya hanya 2 sampai 3 ton per hektar, kini meningkat menjadi 8,7 ton per hektar. Artinya terjadi kenaikan produksi hingga 100%. Ini berkat bibit varietas baru jenis padi hibrida 168 yang memberikan nilai ekonomi lebih bagi para petani dalam semangat mewujudkan swasembada pangan. Pesan saya jangan dijual (gabah) kepada ke Tengkulak, kalau dijual ke Bulog harga akan lebih stabil. Harga di Bulog Rp. 4.600 per kilogram" ungkap Mentan.



Lebih lanjut Mentan menerangkan bahwa saat sejumlah daerah di Jawa kekeringan, lahan rawa pasang surut di Kalimantan Tengah mulai memasuki masa panen. Seluruh potensi akan dioptimalkan untuk mencapai swasembada pangan. Misalnya, di Jawa akan dilakukan hujan buatan.

"Kalimantan yang tidak terpengaruh El Nino setelah selesai panen akan langsung dilanjutkan dengan menanam lagi. Kalimantan mempunyai potensi di sektor pertanian yang sangat besar khususnya di lahan rawa pasang surut. Peluang ini lah yang harus mampu dimanfaatkan dengan baik" terang Mentan.

Mentan mengungkapkan betapa pentingnya teknologi untuk meningkatkan produksi, seperti halnya padi hibrida yang baru dipanen itu bisa mencapai 8 ton/ha dari sebelumnya yang hanya 3 ton/ha. Peluang untuk meraih swasembada di Indonesia sangat besar, misalnya penggunaan benih unggul sesuai dengan kondisi lahan Benih padi varietas hibrida yang ditanam di lahan rawa pasang surut dapat menghasilkan 8-9 ton gabah kering panen per hektar.

"Benih bisa menyelesaikan swasembada. Kalau di semua wilayah Indonesia menggunakan benih varietas unggul, kita sudah bisa swasembada. Belum lagi ditambah dengan mekanisasi dan metode jajar legowo. Produksi varietas baru ini produksinya mencapai 8-9 ton dari yang sebelumnya hanya 3 ton karena menggunakan metode tanam jajar legowo. Ini peningkatan yang luar biasa," kata Mentan.

Terkait maraknya alih fungsi lahan pertanian ke perkebunan kelapa sawit mendapat perhatian. Meski masih belum mengancam ketahanan pangan, Mentan mendesak pemda setempat agar mengeluarkan regulasi untuk menekan terjadinya alih fungsi lahan. Tujuannya agar alih fungsi lahan dibatasi.

Kendati belum diketahui secara pasti berapa penyusutan luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan itu, namun setidaknya di Kabupaten Kapuas ada izin arahan lokasi perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan pertanian. Di antaranya di wilayah Kecamatan Dadahup yang meliputi A6, A7, A8, A9, C1, C2, C3, C4 hingga Kecamatan Kapuas Murung.

Ironisnya, pemerintah pusat juga telah membangun sarana infrastruktur penunjang pertanian seperti saluran sekunder, tersier di kawasan tersebut yang menelan dana ratusan miliar rupiah. Di kawasan tersebut terdapat ribuan hektare lahan potensi dan lahan pertanian. Begitu juga dengan di kawasan Terusan juga sudah dikelung perkebunan kelapa sawit.

Walau demikian, Mentan mengaku masalah alih fungsi lahan tersebut belum menjadi ancaman, tetapi menjadi tetap menjadi perhatian pemerintah, sedangkan untuk menggenjot target swasembada pangan yang ditargetkan dalam waktu tiga tahun ke depan, maka ancaman alih fungsi lahan itu dibalik menjadi potensi. Yakni, dengan menggunakan benih unggul.

"Di sini terusan dahulunya produksi padi sebesar 3 ton per hektare dan kini menjadi 8 ton sampai 9 ton per hektare. Itu masih penggunaan bibit biasa. Belum alsintan dan metode tanam sejajar legowo, padi di seluruh Indonesia menggunakan varietas unggul misalnya ada lima juta hektare lahan dikali jumlah produksi tersebut, maka sudah swasembada" ujar Mentan.

Mentan menambahkan saat sekarang Kementan sudah membuka lahan pertanian baru di beberapa wilayah di Indonesia. Tahun 2015 totalnya sekitar 23 ribu hektare. Kalau Kalteng mau, siapkan proposalnya sehingga dilaksanakan pada 2016 nanti



Di Tengah Kekeringan Kaltim Tetap Berproduksi Pemerintah Naikan Anggaran Pertaniannya

"Di tengah ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino ternyata pertanian di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, seperti di sini tetap mampu berproduksi. Pemerintah memberi perhatian khusus pada bidang pertanian. Dukungan penuh pemerintah terhadap bidang pertanian terlihat dari diputuskannya kenaikan anggaran. Khusus untuk Kalimantan Timur, dari anggaran tahun 2014 sekitar Rp 165 miliar menjadi hampir Rp 500 miliar tahun 2015"



Kabupaten Berau merupakan salah satu daerah yang menjadi pusat pengembangan pertanian di Kalimantan Timur. Daerah tersebut menjadi penopang program upaya khusus ketahanan pangan dengan budidaya salah satunya padi. Hal ini dapat dibuktikan para kelompok tani Buyung Buyung Kecamatan Tabalar, kendati Indonesia dilanda kemarau panjang, mereka justru panen padi berlimpah. Melihat potensi dan produksi pertanian di Buyung-buyung, Pemerintah RI melalui Kementerian Pertanian memberikan perhatian lebih pada daerah tersebut.

"Pemerintah memberi perhatian khusus pada bidang pertanian. Dukungan penuh pemerintah terhadap bidang pertanian terlihat dari diputuskannya kenaikan anggaran sampai 100 persen. Khusus untuk Kalimantan Timur, dari anggaran tahun lalu sekitar Rp 165 miliar menjadi hampir Rp 500 miliar tahun ini, dari jumlah tersebut Berau mendapat porsi bantuan dana pertanian sebesar Rp 15 miliar. Jumlahnya menjadi tiga kali lipat dari tahun lalu yaitu hanya Rp 5 miliar" kata

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat melakukan Panen Raya Padi di Buyung-buyung, Tabalar, Kab. Berau, (12/8).

Dalam melakukan panen padi, Mentan didampingi Anggota Komisi IV DPR, Bupati Berau, Wakil Bupati Berau, Komandan Kodim 0902/Tanjung Redeb (TRD) Berau, Kepala Balai Besar Penelitian Tanaman Padi dan Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau. Tidak hanya melakukan Panen Raya bersama pejabat daerah secara manual menggunakan ani-ani, Mentan secara langsung menyaksikan demonstrasi combine harvester yang merupakan realisasi bantuan kegiatan Upsus.

"Di tengah ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino ternyata pertanian di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, seperti di sini tetap mampu berproduksi, dan ini harus kita optimalkan dengan mesin pertanian. Saya berjanji tidak akan khianati petani dan berkomitmen untuk siap membela kepentingan para petani yang ada di seluruh Indonesia, dan berjanji akan terus mendorong para petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian demi

mencapai swasembada pangan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah" ujar Mentan.

Terkait kekeringan, Mentan menegaskan masyarakat agar tidak perlu khawatir akan dampak pangan di musim kering yang melanda Indonesia saat sekarang. Pemahaman masyarakat perlu diperkuat bahwa padi yang telah dipanen petani sampai Agustus sudah dapat dipakai untuk kebutuhan masyarakat Indonesia sebanyak 76 persen. Seharusnya pada musim kering, yaitu September hingga Oktober, petani masih bisa memanen 15 persen.

"Pasokan ditutup dengan target panen untuk memenuhi 9 persen sisanya pada November dan Desember. Sebenarnya yang dipertaruhkan saat kondisi elnino ini yang 15 persen. Tak perlu dikhawatirkan, apalagi masih ada tambah tanam lahan seluas 400 hektar nantinya. Ada yang keliru soal kondisi elnino di Indonesia. Orang khawatir akan ketersediaan pangan, padahal produksi petani akan pangan khususnya beras sudah mencapai target," tegas Mentan.

Saat berdialog dengan para petani setempat yang meminta dukungan waduk, dan alat mesin pertanian khususnya combine harvester, permintaan tersebut langsung ditanggapi Mentan dengan memerintahkan Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementan, untuk mencatat permintaan para petani. Oleh sebab itu, dalam kesempatan, Mentan juga memberikan bantuan secara simbolis pupuk, pembuatan sumur dangkal, embung (penampungan air), alat tanam, traktor dan beberapa kebutuhan petani lainnya.

"Saya penuhi permintaan saudara-saudara saya di sini, kita akan membuat sumur dangkal dan embung sebagai sumber pengairan. Kepala Pusdatin, agar membuat

catatan dalam mengalokasikan bantuan pembuatan sumur dangkal dan embung. Bantuan lainnya untuk Berau, adalah 10 unit pompa air, dan 10 unit traktor Saya juga akan memberikan 10 alat panen, agar dapat meningkatkan produksi padi di sini, kedepan saya berjanji akan membangun sistem yang kuat dan yang baik, saya optimistis Indonesia mampu memproduksi pangan dalam negeri” ujar Mentan.

Menurut Mentan, kebijakan tersebut adalah salah satu dari Sembilan kebijakan yang

dikeluarkan. Biasanya, benih, bibit dan traktor ditender. Tetapi sekarang jamannya harus terbuka, baik yang ditender maupun penunjukkan langsung. Jadi semua bantuan proses penunjukkan langsung, mulai dari traktor, alsinta mini sampai kebutuhan petani. Setelah diizinkan Presiden, maka pola seperti itu harus diubah, semua harus dilakukan penunjukkan langsung.

“Sedangkan kalau dengan tender di bulan Januari, selesai tender di bulan

Maret, April sampai Mei itupun kalau tidak ada sengketa. maka setelah panen ke dua bantuan pupuknya baru datang. Satu minggu ada keterlambatan pupuk bisa kehilangan satu ton, kalau 54 persen maka seluruh Indonesia, akan kehilangan 5 juta ton, itu sama dengan kehilangan uang sebesar Rp 20 triliun. Oleh sebab itu, kalau kebijakan itu keliru, itu lebih jahat dari pada koruptor,” tutur Mentan.

Optimalkan Produktivitas Padi Kalsel Setara Produktivitas Padi Di Jawa

“Panen di seluruh wilayah Kalimantan pada Agustus tidak bermasalah karena Kalimantan tidak terdampak El Nino. Karena itu, lahan tanaman padi di Kalimantan harus dioptimalkan dan produktivitas panen di daerah tersebut dapat terus ditingkatkan sampai menyamai produktivitas pertanian di Pulau Jawa”



Kementerian Pertanian sedang memfokuskan untuk mengembangkan produksi pangan wilayah Kalimantan, karena memiliki potensi yang tinggi untuk terus didorong perkembangannya. Terbukti, produksi padi Kalsel, sudah cukup luar biasa menyumbang pangan nasional yaitu mencapai 700 ribu ton, dan potensi tersebut masih sangat mungkin untuk terus dikembangkan menjadi lebih besar lagi. Kementan akan mengupayakan berbagai program dan kebijakan untuk meningkatkan produksi pangan Kalimantan,

“Program dan kebijakan antara lain dengan program tanam dari yang saat ini baru satu kali panen menjadi dua bahkan tiga kali panen, Saya sudah satu minggu ini berada di wilayah Kalimantan, untuk mengetahui secara langsung potensi yang bisa dikembangkan, dan apa yang bisa dilakukan pemerintah” kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat usai melakukan panen raya padi di Desa Karang Buah, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan (10/8).

Saat panen, Mentan didampingi Bupati Barito Kuala, Komandan Resor Militer 101/ Antasari Kolonel (Inf), dan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalsel. Panen dilakukan di atas lahan seluas 160 hektar. Padi yang dipanen merupakan varietas margasari dengan masa tanam tiga bulan, dengan produktivitas sekitar 4,7 ton per hektar. Dengan masa tanam yang singkat, produktivitas yang dicapai dari lahan tersebut mencapai 4,7 ton per hektar. Suatu angka yang sangat menerbitkan harapan dan optimisme di tengah kabar ancaman kekeringan di lahan pertanian Indonesia.

Kabar produktifnya lahan pertanian di Barito Kuala sendiri sebenarnya tidak begitu mengherankan. Daerah tersebut cukup memiliki jejak rekam produktivitas pertanian yang menjanjikan. Pada periode Januari-April, sekitar 98 ribu hektar lahan telah dipanen dengan produktivitas mencapai 500 ribu ton. Sementara pada periode Mei-Agustus, luas lahan yang dipanen mencapai 312 ribu hektar dengan produktivitas 1,2 juta ton.

Menurut Mentan, panen di seluruh wilayah Kalimantan pada Agustus tidak bermasalah karena Kalimantan tidak terdampak El

Nino. Bencana kekeringan yang melanda sejumlah daerah di Indonesia tidak berlaku di Kalimantan. Karena itu, lahan tanaman padi di Kalimantan harus dioptimalkan. Atas dasar itu, Mentan mengharapkan produktivitas panen di daerah tersebut dapat terus ditingkatkan sampai menyamai produktivitas pertanian di Pulau Jawa.

“Saya minta produktivitas padi di Kalimantan Selatan ditingkatkan. Kalau bisa, produktivitasnya setara dengan di Jawa yang mencapai 7-8 ton per hektar. Apalagi saat ini, di saat daerah lain terkena dampak El Nino, wilayah Kalimantan Selatan justru tidak terpengaruh, malah terjadi peningkatan produksi, tentu hal ini merupakan suatu harapan baru untuk terus dikembangkan oleh pemerintah daerah dan petani” ujar Mentan.

Berbagai kebijakan bidang pertanian terus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan produksi pertanian nasional, salah satunya dengan memperbanyak penggunaan alat mesin pertanian alsinta, seperti yang dilakukan Mentan yang menyerahkan sejumlah bantuan seperti 10 ton benih Inpara, 900 kg kedelai, alat Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS), alat Perangkat Uji Tanah Kering (PUTK), traktor, pompa, combine harvester kepada

para petani yang secara simbolis diterima oleh sejumlah gapoktan di desa Karang Buah Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala .

"Banyak daerah di Kalimantan Selatan yang memiliki potensi besar untuk ditingkatkan produksinya, melalui teknologi pertanian yang sesuai dengan kondisi lahan. Dengan berbagai bantuan tersebut, Kementerian Pertanian berharap produktivitas pertanian di Kalimantan Selatan dapat terus berkembang hingga mencapai tahap yang menggembirakan. Hingga pada akhirnya target kedaulatan pangan yang hendak dicapai pada 2017 bukan lagi sekadar mimpi dan angan-angan belaka" kata Mentan.

kebijakan import beras dipastikan tidak akan dilakukan pemerintah sepanjang para petani Indonesia masih bisa memproduksi bahan pangan utama bagi masyarakat Indonesia sendiri. Pemerintah tidak akan melakukan import beras, selama petani masih bisa memproduksinya , Import beras hanyalah kebijakan terakhir yang akan diambil pemerintah.

"Selama para petani Indonesia masih bisa memproduksi tanaman pangan , import beras tidak akan dilakukan, karena hal tersebut sangat memberatkan bagi pemerintah dan menyakitkan para petani sendiri karena bisa merusak harga beras di pasaran yang sangat merugikan petani dalam negeri ." jelas Mentan.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala Zulkipli Yadi Noor mengatakan daerahnya memberikan kontribusi beras terbesar di Kalimantan Selatan yang mencapai sekitar 17 sampai 20 persen setiap tahunnya. Sampai dengan Agustus 2015 diperkirakan luasan lahan yang sudah panen hanya sekitar 16 persen

"Diperkirakan sekitar bulan September 2015 mendatang sekitar 98 persen lahan pertanian di Kabupaten Barito Kuala akan panen. luasan keseluruhan lahan pertanian di Kabupaten Barito Kuala mencapai lebih dari 99 ribu hektar yang sebagian besar merupakan pertanian lahan rawa" kata Kadin TPH Barito Kuala.

Terkait impor, Mentan mengatakan Dalam kesempatan yang sama Kepala

Kementan Gelar Rapat UPSUS Untuk Rumuskan Langkah Menjamin Stok Beras



"Rapat Upaya Khusus Peningkatan Industri Perberasan penting dan strategis pada saat sedang menghadapi kekeringan sebagai dampak El Nino. Dalam menghadapi persoalan musim kemarau dan dampak El Nino, para petani agar tetap semangat dan membantu pemerintah dalam menciptakan swasembada pangan. Dengan adanya pertemuan Rapat Upaya Khusus Peningkatan Industri Perberasan dapat merumuskan langkah aksi dalam menjamin stok beras dan dapat mengendalikan fluktuasi harga beras yang mungkin terjadi"

Kementerian Pertanian menyadari untuk mewujudkan suatu ketahanan pangan nasional maka kecukupan pangan merupakan syarat mutlak yang harus dicapai, salah satunya dengan terwujudnya kecukupan komoditi beras yang merupakan komoditas strategis baik ditinjau dari berbagai aspek sosial, ekonomi dan politik. Kementan sudah menyatakan kesiapan dan telah menyanggupi apa yang telah ditargetkan oleh Presiden yakni swasembada pangan. Hal itulah yang menjadi dasar Kementan mengadakan pertemuan akbar dengan ribuan petani dalam suatu Rapat UPSUS.



"Rapat ini penting dan strategis pada saat kita sedang menghadapi kekeringan sebagai dampak El Nino. Dalam menghadapi persoalan musim kemarau dan dampak El Nino, para petani agar tetap semangat dan membantu pemerintah dalam menciptakan swasembada pangan.

Karena hasil dari petani bukan untuk Pemerintah tapi untuk seluruh rakyat Indonesia" kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat Rapat Upaya Khusus Peningkatan Industri Perberasan di lapangan kanpus Kementan (26/8).

Dalam rapat yang dihadiri lebih dari 5.000 orang pelaku usaha penggilingan padi atau Rice Milling Unit (RMU), pedagang beras, asosiasi-asosiasi pertanian, Kontak Tani Andalan Indonesia (KTNA),



eksportir dan importir beras, prajurit TNI, dinas dan badan lingkup pertanian di kabupaten/provinsi dari 34 provinsi, Mentan menjelaskan pihaknya tidak tinggal diam dalam mengatasi dampak El Nino yang menyebabkan kemarau panjang.

"Saat ini, Kementan telah mendistribusikan 21 ribu unit pompa untuk para petani yang terkena dampak kekeringan ke seluruh Indonesia. Pemerintah membantu para petani dengan mendistribusikan pompa air dan traktor secara gratis. Itulah, bentuk perhatian Pemerintah kepada para petani dan keseriusan Presiden didalam mencita-citakan swasembada pangan di Indonesia. Jadi petani harus semangat" jelas Mentan.

Selain mendistribusikan pompa, Mentan mengungkapkan pihak Kementan telah mengadakan rapat bersama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk memantau dampak El Nino di tanah air. Mentan juga menjelaskan keluhan petani mengenai tingginya harga pupuk juga telah mulai teratasi.

"Kami baru saja rapat dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, saat kami bertanya apakah ada hujan di bulan November, BMKG menyatakan ada. Walaupun demikian kami tetap tidak tinggal diam, kami telah membagi-bagi pompa sebanyak 21 ribu unit di seluruh Indonesia selain itu mulai hari ini keluhan pupuk sudah mulai menurun," ungkap Mentan.

Mentan berharap dengan adanya pertemuan Rapat Upaya Khusus Peningkatan Industri Perberasan dapat merumuskan langkah aksi dalam menjamin stok beras dan dapat mengendalikan fluktuasi harga beras yang mungkin terjadi. Mentan juga meminta kepada petani dan seluruh pihak terkait untuk tetap berusaha dalam meningkatkan produksi beras supaya Indonesia tidak

perlu impor beras.

Saat sekarang Kementerian Pertanian sedang mengupayakan upaya lain dalam pengamanan produksi beras yaitu melaksanakan revitalisasi penggilingan padi. Mentan menegaskan bahwa penggilingan padi yang ada di tingkat petani masih menggunakan mesin yang sudah tua sehingga berpotensi kehilangan hasil panen padi sekitar 13%.

"RMU atau penggilingan padi yang telah disiapkan Kementan merupakan mesin 2 fase. Dari mesin tersebut diharapkan kualitas beras dapat meningkat dan upaya penekanan kehilangan hasil juga dapat menaikkan rendemen gabah yang saat ini sekitar 57% menjadi 67%. Kita siapkan anggaran sebesar Rp 368,5 milyar untuk pengadaan bantuan 957 unit Rice Milling Unit (RMU)," tegas Mentan.

Dengan memperhatikan peran strategis RMU, maka Kementan sejak 2010 hingga sekarang telah merevitalisasi 2.361 unit RMU skala kecil milik Gapoktan/kelompok tani sehingga meningkatkan rendemen hingga lima persen. Mentan menilai RMU berperan mengolah gabah menjadi beras untuk selanjutnya dijual ke pasar/konsumen. Di samping itu sebagian beras diserap Bulog untuk cadangan beras Pemerintah dan sebagian oleh ritel modern, seperti minimarket, hypermarket, supermarket, dan perkulakan.

"Kegiatan revitalisasi RMU ini akan terus ditingkatkan pada tahun mendatang dengan jumlah dan cakupan wilayah yang lebih luas, Keberadaan RMU ini sangat penting dalam rantai pasok beras sampai ke konsumen, Ini dapat dijadikan salah satu barometer jumlah beras dan ketersediaan stok beras di suatu wilayah, Keberadaan RMU sangat penting dalam rantai pasokan beras sampai ke konsumen dengan menjadi mitra kerja Bulog" ujar Mentan.

Dalam kegiatan tersebut dilakukan penandatanganan komitmen pemilik penggilingan padi (RMU) dan petani untuk menjual gabah dan berasnya ke Perum Bulog sebagai upaya menjaga stok beras pemerintah. Kementan berhasil menggalang komitmen hampir 3.000 pelaku usaha penggilingan padi atau Rice Milling Unit (RMU) yang tersebar di sentra-sentra produksi padi untuk menjadi mitra kerja Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). Mereka diharapkan dapat memasok penyediaan beras bagi Bulog untuk penyediaan beras pada Toko Tani Indonesia (TTI) yang tersebar di pasar-pasar strategis Indonesia.

Mentan menyatakan sebanyak 4.300 rice milling unit (RMU) atau pelaku usaha penggilingan padi berkomitmen untuk menyuplai 1,4 juta ton beras kepada Bulog hingga September nanti jika pada Oktober nantinya terealisasi tambahan produksi dari hasil panen petani 1 juta ton maka keseluruhannya menjadi sekitar 2,5 juta ton yang siap diserap oleh Bulog dengan adanya komitmen tersebut sehingga Pemerintah hanya dalam satu hari berhasil menerima tambahan pasokan beras dari petani sebanyak 1,4 juta ton untuk disalurkan ke gudang Bulog.

"Pemerintah akan mengambil langkah-langkah strategis baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang untuk meningkatkan peran serta seluruh pelaku usaha yang terkait dengan proses produksi dan penyediaan pangan pokok ini, Ada kesanggupan dari 4.300 RMU menjual ke Bulog sebanyak 1,4 juta ton beras sampai September. Ini masih bisa bertambah sebab Oktober masih ada panen sehingga bisa menjadi 2,5 juta ton, Hari ini terkumpul beras dari petani yang siap dijual ke Bulog sebanyak 1,4 juta ton, itu sangat spektakuler," kata Mentan.



Kementan dan GPMT Sepakat Bentuk Tim Khusus Pengendali Pasokan Jagung

"Kementan bersama GPMT sepakat membentuk tim khusus dalam rangka pengendalian pasokan jagung. Tim khusus tersebut bertujuan untuk mengkomunikasikan seluruh persoalan di lapangan. Tim khusus tersebut bertugas mendata kebutuhan pakan ternak. Ke depan pembentukan tim khusus tersebut untuk mengatasi apabila terjadi ledakan-ledakan yang dapat menimbulkan persoalan jagung dan mengganggu ketersediaan pakan ternak"



Pemerintah RI terus berupaya memperhatikan kepentingan petani jagung, dengan meningkatkan penyerapan jagung dalam negeri. Untuk itu impor jagung akan dikendalikan yakni impor dilakukan sesuai dengan kebutuhan industri makanan ternak di dalam negeri. Sehingga ketersediaan jagung dalam negeri terus terpenuhi dan produksi jagung para petani tetap mendapatkan harga yang menguntungkan.

"Jadi persoalannya bukan kebijakan ekspor atau tidak ekspor, dan impor atau tidak impor. Pemerintah mengendalikan kebijakan ekspor-impor sesuai kebutuhan bukan keinginan sekelompok orang. Adanya kesepakatan bersama ini sangat bagus, karena kita perlu bergandengan agar republik ini ke depan yang lebih baik," kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman usai rapat koordinasi dengan Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) di Hotel Borobudur Jakarta (19/8).

Mentan menerangkan rapat koordinasi tersebut bukan membahas persoalan apa yang sedang terjadi, namun dalam rangka membangun silaturahmi dan memperlancar komunikasi dengan para pengusaha atau asosiasi makanan ternak yang tergabung dalam GPMT. Mentan meminta agar para pengusaha dapat meningkatkan produksi jagung dalam negeri, agar mampu memenuhi kebutuhan jagung secara nasional. Kedua pihak juga setuju meningkatkan penyerapan jagung lokal sebagai prioritas pemenuhan bahan baku ternak. Impor hanya akan dilakukan jika pasokan di dalam negeri tidak mencukupi.

Mentan menjelaskan Kementerian Pertanian bersama Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) sepakat membentuk tim khusus dalam rangka pengendalian pasokan jagung. Tim khusus tersebut bertujuan untuk mengkomunikasikan seluruh persoalan di lapangan. Tim khusus tersebut bertugas mendata kebutuhan pakan ternak. Tim khusus yang berasal dari Kementerian

Pertanian dan asosiasi pengusaha jagung untuk menghitung kebutuhan jagung dalam negeri. Kemudian, ke depan pembentukan tim khusus tersebut untuk mengatasi apabila terjadi ledakan-ledakan yang dapat menimbulkan persoalan jagung dan mengganggu ketersediaan pakan ternak.

"Ini untuk mengkomunikasikan seluruh persoalan-persoalan yang ada sehingga komunikasi antara GPMT yang kemudian disampaikan oleh kementerian dan pemerintah lancar. Persoalan-persoalan yang dialami para pengusaha jagung harus segera dikomunikasikan, sehingga nantinya tim khusus ini dapat mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain itu, tim khusus ini juga harus memperhatikan kesejahteraan para petani jagung. Tim ini mengkomunikasikan seluruh masalah yang ada di asosiasi. Kalau ada persoalan, kemudian disampaikan. Selain itu tim ini juga harus memperhatikan petani-petani jagung kita yang ada di seluruh Indonesia," terang Mentan.

Lebih lanjut Mentan menjelaskan bahwa persoalan-persoalan yang ada pada para pengusaha pakan ternak harus segera dikomunikasikan, sehingga nantinya Tim Khusus dapat mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain itu, Tim Khusus juga harus memperhatikan kesejahteraan para peternak dalam negeri agar dapat imbal hasil yang setimpal. Tim khusus yang akan dibentuk dalam dua hari ke depan bertugas mendata stok dan kebutuhan jagung untuk pakan. Dengan adanya tim tersebut komunikasi pemerintah dan GPMT akan lancar, Tim terdiri dari Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian,



Peternakan, Bulog, GPMT, dan Kementerian Perdagangan.

"Tim khusus ini beranggotakan 4 - 5 orang yang terdiri dari pihak Kementan, asosiasi, dan Perum Bulog. Tim khusus ini memiliki peran strategis dalam membangun komunikasi dan memberikan solusi terhadap seluruh persoalan yang terjadi dan memperlancar persediaan bahan makanan ternak. Jadi, dengan adanya tim khusus ini, komunikasi GPMT dengan Kementan atau pemerintah lancar dan semua sepakat terkait dengan keputusan yang dibutuhkan dalam mengatasi persoalan, tim baru ini akan mengkomunikasikan seluruh persoalan yang ada di GPMT, para petani, dan pemerintah. Dengan adanya tim yang diisi dari pemerintah dan pihak swasta, Amran berharap, tidak ada lagi simpang siur data terkait impor jagung" jelas Mentan.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementan, Hari Priyono juga menerangkan Tim tersebut nantinya akan membicarakan kebutuhan jagung. Banyak yang terlibat, Direktorat Pangan,

peternakan, Bulog, GPMT, perdagangan, mereka akan membuat peta sentra-sentra industri jagung nasional dan pabrik pengolahannya.

"Penyesuaian dilakukan untuk mendapatkan harga pakan ternak yang wajar, dengan memperhitungkan lokasi pabrik dan lahan pertaniannya. Jangan sampai pabriknya di Lampung tapi kebun jagungnya di Sulawesi, harganya jadi turun, Jadi Tim itu, akan memberikan masukan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang tepat." kata Sekjen.

Ketua Pengusaha Makanan Ternak, Sudirman berharap ke depan tidak ada lagi perbedaan perhitungan kebutuhan jagung antara pemerintah dan pengusaha pakan ternak. Sebab, setelah pertemuan dengan Mentan, GPMT dan pemerintah sepakat membentuk tim khusus untuk sinkronisasi kebutuhan jagung.

"Tim ini nanti akan membicarakan kebutuhan jagung. Nanti ada sinkronisasi, memberikan masukan pada pemerintah

untuk membuat kebijakan-kebijakan yang tepat. Yang kemarin-kemarin itu pelajaran buat kita semua, terutama buat para industri pakan ternak, dan buat pemerintah," harap Ketua GPMT.

Ketua GPMT menegaskan pengusaha pakan ternak, siap mendukung program swasembada jagung dalam 3 tahun yang ditetapkan pemerintah. Dukungan tersebut akan dilakukan lewat penyerapan jagung lokal sebanyak mungkin dari petani dengan harga yang menguntungkan, sehingga para petani bersemangat menanam jagung.

"Tujuan kita sama, industri pakan ternak terpenuhi kebutuhannya, target-target pemerintah juga terpenuhi, bahkan didorong oleh kebutuhan industri. Yang lebih penting lagi adalah meningkatkan kesejahteraan petani, Stok jagung untuk kebutuhan pakan ternak saat ini masih sekitar 1,6 juta ton alias aman hingga 2 bulan ke depan. Sehingga belum dibutuhkan tambahan pasokan jagung dari impor" tegas Ketua GPMT.

Kementan Lindungi Petani Dengan Asuransi Pertanian

"Kementan sedang mempercepat pelaksanaan program asuransi pertanian untuk melindungi para petani dari kerugian akibat El Nino atau kemarau ekstrem yang membuat gagal panen. Mentan bersikeras agar asuransi tersebut dapat segera terealisasi. Hal tersebut untuk melindungi para petani dari risiko seperti gagal panen"



Pemerintah ingin memberikan perlindungan lebih kepada para petani. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memberikan asuransi pertanian. Kementerian Pertanian sedang mempercepat pelaksanaan program asuransi pertanian untuk melindungi para petani dari kerugian akibat El Nino atau kemarau ekstrem yang membuat gagal panen.

"Pemberian asuransi pertanian tersebut diharapkan dapat berjalan pada tahun ini. Kalau saya maunya lebih cepat. Mudah-mudahan tahun ini, para petani bisa menikmati asuransi" kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat Rapat koordinasi di Kantor Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta (6/8).

Mentan bersikeras agar asuransi tersebut dapat segera terealisasi. Hal tersebut untuk melindungi para petani dari risiko seperti gagal panen. Tetapi terbitnya beleid soal asuransi pertanian dari Kementerian Pertanian masih sebatas kebijakan di atas kertas dan belum terimplementasikan di lapangan. Buktinya, mayoritas kalangan petani di Jawa Barat mengaku belum mengetahuinya akibat tidak adanya sosialisasi.

Beleid berupa Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 40/Permentan/SR.230/7/2015 yang ditandatangani Mentan pada 13 Juli 2015 itu merupakan regulasi turunan dari UU No.19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Apalagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator lembaga jasa keuangan, termasuk di dalamnya industri keuangan non-bank (IKNB), belum diketahui secara pasti kapan akan mengeluarkan peraturan yang lebih rinci terkait asuransi pertanian.

Menurut Mentan pada tahap awal, asuransi pertanian hanya diperuntukan bagi produksi pertanian pada tiga komoditas pangan utama, yaitu padi, jagung, dan kedelai. Dengan adanya asuransi tersebut diharapkan ada jaminan bagi para petani dalam proses produksi ketiga komoditas tersebut.

"Dengan didapatkannya asuransi pertanian, maka bakal memperoleh jaminan bagi petani dalam proses produksi

ketiga komoditas utama khususnya untuk padi, jagung, dan kedelai. Tapi selanjutnya akan dikembangkan, Teknisnya ada di Direktur Jenderal" tutur Mentan.

Lebih lanjut, Mentan mengungkapkan bahwa untuk besaran asuransi pertanian, pemerintah bakal menggelontorkan anggaran untuk subsidi premi asuransi pertanian. Dalam APBN-P 2015, sudah disiapkan anggaran sebesar Rp 150 miliar untuk asuransi pertanian. Asuransi ini direncanakan untuk 1 juta lahan pangan yang kena dampak. Saat sekarang masih dilakukan verifikasi untuk para penerima asuransi pertanian. Diharapkan asuransi pertanian bisa berjalan sebelum akhir tahun 2015.

"Asuransi untuk pertanian tahun ini ada anggaran Rp 150 miliar. Sementara berproses, masih verifikasi di lapangan. Mudah-mudahan bisa jalan, harapan saya pemberian asuransi pertanian bisa terselenggara dengan lancar di tahun ini. Sebab, pemberian asuransi bisa melindungi petani dari gagal panen. pemberian asuransi pertanian itu bisa direalisasikan secepatnya, agar petani Indonesia bisa menikmati asuransi tersebut" ungkap Mentan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Gatot Irianto, mengatakan bahwa Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) untuk payung hukum asuransi pertanian sudah siap. Kementerian Keuangan juga sudah membuka blokir anggaran untuk asuransi pertanian.

"Sebelumnya, asuransi pertanian terhambat oleh aturan mekanisme anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Permentan untuk Asuransi Pertanian sudah diparaf. Surat untuk pelepasan blokir dari Kemenkeu juga sudah ada, kami rapat dengan eselon II mereka sudah tidak ada keberatan," kata Dirjen PSP.

Dirjen PSP menginginkan asuransi pertanian diprioritaskan untuk daerah-daerah yang rawan kekeringan seluas 200 ribu hektar. Dengan asumsi rata-rata luas lahan yang dimiliki petani seluas 0,3 hektar, maka asuransi pertanian tahun 2015 dapat melindungi 3 juta petani. Tapi hal tersebut masih dibahas dengan pihak asuransi.

"Kami inginnya daerah yang rawan kekeringan dipenuhi dulu, yang 200 ribu hektar itu. Sementara rencana kita kan 1 juta hektar, jadi 800 ribu hektar yang tidak rawan kekeringan. Kalau misalnya 1 juta hektar, 3 orang dalam 1 hektar, paling tidak ada 3 juta petani. Tapi hal itu belum disepakati dengan asuransi," kata Dirjen PSP.

Dirjen PSP menambahkan untuk asuransi pertanian ini, Kementan akan menunjuk konsorsium untuk menjadi pihak asuransi. Hingga saat sekarang belum diputuskan siapa saja perusahaan asuransi yang akan ditunjuk. Nanti Kementan akan meminta OJK, BPKP, LKPP mengawasi supaya akuntabel.

Pesan Mentan Untuk Seluruh Petani Di Indonesia

Kementan telah diberi beban untuk mendukung peningkatan produksi komoditas pangan utama dan berjuang bersama petani untuk pangan rakyat Indonesia demi mencapai swasembada pangan. Pemerintah akan membantu para petani di seluruh Indonesia dengan berbagai sarana dan prasarana, yang menjadi faktor-faktor kunci produksi seluruh komoditas strategis"



Lawat momentum Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 70, Menteri Pertanian menghimbau kepada semua petani di seluruh Indonesia agar meningkatkan produksi pangannya di daerahnya masing-masing. Mentan juga berpesan agar kedepan para petani Indonesia mau menyinggikan

lengan baju untuk turun kesawah lebih giat lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah akan mendukung petani semaksimal mungkin agar mampu melakukan percepatan peningkatan produksi pangan.

"Sahabatku, saudaraku para petani se-Indonesia. Mari kita sama-sama berjuang untuk pangan rakyat Indonesia

demi mencapai swasembada pangan. Saya ingatkan bahwa Kementan telah diberi beban untuk mendukung peningkatan produksi komoditas pangan utama, Pemerintah akan membantu para petani di seluruh Indonesia dengan berbagai sarana dan prasarana, yang menjadi faktor-faktor kunci produksi

seluruh komoditas strategis,” kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat memimpin upacara Hari Kemerdekaan RI di Kampus Kementan (17/8).

Terkait terjadinya kekeringan yang terjadi saat sekarang, Mentan menjelaskan bahwa pihak Kementan akan terus berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengenai ramalan cuaca. BMKG juga memprediksi hujan sudah akan turun pada Oktober dan akan meningkat intensitasnya pada November dan Desember.

“Untuk antisipasi musim kemarau secara permanen, Kementan sudah menyiapkan untuk jangka panjang, dan bersifat permanen, saat ini Kami bersama Kementerian PU-PR akan terus memperbaiki jaringan irigasi tersier yang bisa bertahan selama 10 tahun ke depan dan pemberian pompa sumur dangkal kepada petani yang bisa bertahan selama 20 tahun,” ucap Mentan.

Sedangkan masalah kelangkaan daging sapi saat sekarang, Mentan mengatakan untuk menjamin ketersediaan daging sapi di Pulau Jawa, pihaknya sedang menyiapkan enam kapal ternak, satu di antaranya selesai pada bulan September dan semuanya akan selesai akhir tahun ini. Diharapkan kedepan tidak terjadi lagi kelangkaan daging di pulau jawa dengan adanya kapal pengangkut sapi tersebut yang sedang dibuat.

Dalam upacara tersebut, Mentan memberikan penghargaan Satyalancana Karya Satya kepada sekitar 46 orang PNS di Kementan. Satyalancana Karya Satya adalah tanda penghargaan yang diberikan kepada PNS, yang telah berbakti selama 10 atau 20 atau 30 tahun lebih secara



terus-menerus, dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lainnya. Salah satu penerima Satyalancana 30 tahun tersebut ada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Ir. Hari Priyono, M.Si.

Selain pemberian Satyalancana Karya Satya, Mentan memberikan beasiswa pendidikan senilai Rp 630 juta kepada 88 orang dari tingkat SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Beasiswa Sebelumnya saat memimpin upacara HUT Ke-70 RI Menteri Pertanian, Amran Sulaiman memberikan beasiswa pendidikan kepada 88 siswa dari tingkat SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi dengan total nilai Rp 630 juta.

“Beasiswa ini untuk anak karyawan/karyawati Kementan golongan I dan II yang dapat peringkat di sekolahnya. Kalau bisa jumlah penerimanya ditambah ya tahun depan. Dananya bisa dari keuntungan Toko Tani yang kerjasama dengan Bulog di pasar-pasar. Untuk itu belajar yang rajin

agar nanti besar bisa menjadi menteri juga” kata Mentan.

Usai upacara, Mentan bergerak menuju Pasar Tani yang sengaja digelar di halaman kantor Kementerian Pertanian. Dalam rangka menyambut HUT ke-70 Indonesia, Kementerian Pertanian menggelar pasar tani murah dengan menjual dua komoditas sayuran yakni tomat dan cabai rawit.

Pada kegiatan pasar murah yang digelar di halaman Kementerian Pertanian itu cabai rawit dijual seharga Rp 20.000/Kg sedangkan tomat Rp5.000/kg. Mentan menyatakan, turunnya harga sejumlah komoditas pertanian saat sekarang menunjukkan hasil produksi petani dalam kondisi yang mencukupi.

“Sebelumnya harga cabai mencapai Rp 50.000 per kilogram di pasar dan saat ini menjadi Rp 20.000/kg bahkan bawang merah dari Rp 40.000 menjadi Rp 4.000. Kita patut memberi apresiasi petani yang mampu melakukan produksi yang cukup,” kata Mentan.





Kementan Buktikan Pasokan Sapi Tidak Langka

"Dari langkah sidak yang dilakukan di 2 tempat penggemukan, Kementan sudah menemukan jumlah pasokan sapi yang sangat banyak. hal itu membuktikan pasokan sapi nasional tidak langka dan seharusnya stok cukup, sehingga tidak perlu ada kelangkaan. Masyarakat agar tidak menjadi panik menghadapi gejolak harga sapi yang tinggi di pasar. Sebab, pemerintah melalui Kementan tengah mengupayakan agar terjadi penurunan harga untuk sapi hidup di tingkat feedloter"

Hingga saat sekarang Kementerian Pertanian tengah mengupayakan sejumlah langkah konkrit untuk mengatasi persoalan langkanya pasokannya daging sapi di tingkat pasar, yang menjadi pemicu lonjakan harga. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengunjungi sejumlah perusahaan penggemukan sapi (feedloter) yang ada.

Pada beberapa hari, Kementerian Pertanian melakukan penyidikan pada 2 feedloter yakni di PT. Tanjung Unggul Mandiri (PT TUM), yang berlokasi di teluk naga, Tangerang, Banten didapati puluhan ekor sapi. Sementara di PT. Pasir Tengah yang berlokasi di Cikalongwetan, Cianjur, Jawa Barat, setidaknya ada belasan ribu ekor sapi siap potong, yang masih berada di tempat penggemukan sapi.

"Dalam dua kali sidak di tempat penggemukan sapi (feedlot), saya menemukan 40 ribu ekor sapi siap potong. Sebelumnya, saat menyidak feedlot milik PT Tanjung Unggul Mandiri di Teluk Naga, Tangerang, Banten. Ditemukan adanya stok 21 ribu ekor sapi. Sedangkan di feedlot milik PT Pasir Tengah terdapat

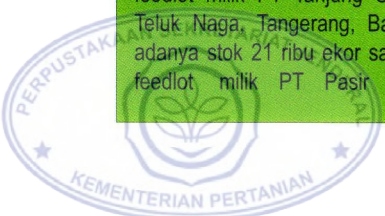


persediaan sapi sebesar 13 ribu ekor" kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat sidak di feedlot milik PT Pasir Tengah di Cikalong Wetan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, (14/8).

Mentan mengungkapkan Kementerian Pertanian mencatat stok sapi di kandang perusahaan penggemukan sapi (feedlot) masih di atas 100 ribu ekor, dan itu masih berada di pihak feedloter. Bila dirata-ratakan,

kebutuhan daging sapi per bulan untuk wilayah DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat mencapai 60.000 ekor. Dengan total stok sapi hidup sebanyak 100.000 ekor, tentunya akan sangat cukup untuk memenuhi permintaan daging sapi di wilayah Jabodetabek.

"Kami cek stok di sini ada sekitar 13.000 ekor. Feedlot 10.000, inbreeding 3.000 ekor, Kita berharap, dari jumlah yang



sekian banyak, pihak feedloter segera mengeluarkan sapi siap potong untuk diedarkan kepada masyarakat. Sebab, dari 100.000 ekor sapi yang ada di feedloter ini, kalau dikeluarkan semua akan sangat mencukupi kebutuhan daging se-Jabodetabek” ungkap Mentan.

Lebih lanjut Mentan menerangkan dari langkah sidak yang dilakukan di 2 tempat penggemukan itu saja, Kementan sudah menemukan jumlah pasokan sapi yang sangat banyak. hal itu membuktikan pasokan sapi nasional tidak langka dan seharusnya stok cukup, sehingga tidak perlu ada kelangkaan.

Terkait dengan harga, Mentan menghimbau masyarakat agar tidak menjadi panik menghadapi gejala harga sapi yang tinggi di pasar. Sebab, pemerintah melalui Kementerian Pertanian tengah mengupayakan agar terjadi penurunan harga untuk sapi hidup di tingkat feedloter.

“Dalam sidak, pihak Kementan sukses memperoleh kesepakatan penurunan harga daging sapi hidup per kilo dari harga Rp 45 ribu ke angka Rp 38 ribu. Pasokan ada, biaya perawatan dan penggemukan juga tidak meningkat, jadi tidak ada alasan untuk menaikkan harga,” ujar Mentan.

Mentan meyakini bahwa hingga saat sekarang pihak feedloter telah melakukan langkah negosiasi harga, dan mereka pun setuju soal harga turun ke Rp 38.000 per kilogram, dari patokan harga sebelumnya Rp 45.000 per kilogram.



“Kalau sebelumnya harga di feedloter Rp 45.000, dengan sendirinya harga di pasar juga pasti naik hingga Rp 140.000, tetapi kalau harganya sudah turun ke 38.000 maka kisaran harga jual ke pasar juga pasti turun. Bahkan, harganya bisa di bawah Rp 100.000,” kata Mentan

Dengan adanya penurunan harga yakni dari Rp 45 ribu per kilogram per sapi hidup menjadi Rp 38 ribu per kilo per sapi hidup. Mentan berharap penurunan harga tersebut menjadi muasal penurunan harga daging sapi di pasar di bawah Rp 100 ribu.

“Besok bisa segera daging sapi yang di pasar akan turun harga, karena dari 41 perusahaan feedloter se jabodetabek, terdapat 35 perusahaan yang sudah menyatakan sepakat menurunkan harga

sapi hidup per kilogram di angka Rp 35 ribu” kata Mentan.

Atas kesepakatan dengan 35 perusahaan yang menurunkan harga daging sapi tersebut, maka Mentan pun berjanji akan mempermudah perizinan feedloter apabila bersahabat dengan para penjual daging sapi. Kementan siap melayani semuanya seperti petani, peternak, masyarakat serta pengusaha.

“Saya akan mempermudah segala urusan terkait feedloter, jika pengusaha bersahabat dengan para pedagang, pasti saya permudah, itu merupakan bagian dari komitmen kami. Pasti kita bantu bagi yang membantu sesama, kami permudah segala urusannya, yang berhubungan dengan Kementerian Pertanian,” ujar Mentan.







Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
BIRO UMUM DAN HUMAS
Jl. Harsono RM No. 3 Jakarta Selatan
Telp./Fax. (021) 780 4457

humas@pertanian.go.id
Website : www.pertanian.go.id